SKRIPSI

FUNGSI DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA PONTIANAK

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh:

Devi Lestari
NIM. E1032211024

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

FUNGSI DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA PONTIANAK

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Devi Lestari
NIM. E1032211024

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing Utama

Drs. Sukamto, M.Si Tanggal:……..
NIP. 196010081987031002

Dosen Pembimbing Pendamping

Dr. Yulius Yohanes, M.Si. Tanggal:……..
NIP. 196405271992021001

UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK

LEMBAR PENGESAHAN

FUNGSI DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA PONTIANAK

Oleh:
Devi Lestari
NIM. E1031211094

Dipertahankan di : Pontianak
Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 12 September 2025
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Sidang 5

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Drs. Sukamto, M.Si	Dr. Yulius Yohanes, M.Si
NIP. 196010081987031002	NIP. 196405271992021001
Penguji Utama	**Penguji Pendamping**
Dr. Elyta, M.Si	Haunan Fachry Rohilie, S.IP., M.A
NIP. 197906272005012002	NIP. 199003182019031010

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP UNTAN

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Devi Lestari : Fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pontianak. **Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak 2025.**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Pontianak. Peraturan yang mengatur fungsi dinas tersebut adalah Peraturan Walikota Pontianak Nomor 53 Tahun 2022 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, serta tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan tiga indikator Teori Fungsi, yaitu Fungsi Pelayanan, Fungsi Pemberdayaan, dan Fungsi Pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian, fungsi pelayanan dinas tersebut berjalan cukup baik melalui pemberian sarana, layanan informasi, dan legalitas usaha berbasis digital. Namun, masih ada kendala dalam bentuk keterbatasan literasi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan jumlah tenaga aparatur yang memengaruhi kualitas pelayanan. Fungsi pemberdayaan menunjukkan bahwa dinas tersebut telah melakukan berbagai program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, seperti pelatihan, bantuan modal, fasilitasi promosi, serta kerja sama lintas sektor. Meski demikian, ada beberapa hambatan seperti keterbatasan informasi, literasi digital, dan akses pasar. Fungsi pembangunan dinas tersebut diwujudkan melalui pembangunan sentra kuliner, pasar rakyat, Gedung Usaha Mikro Kecil dan Menengah, fasilitasi pemasaran, dan transformasi digital. Namun, masih ada kendala seperti keterbatasan modal, sumber daya manusia, serta literasi teknologi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Kata Kunci : Fungsi,Dinas Koperasi,Usaha Mikro Kecil dan Perdagangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

ABSTRACT

Devi Lestari: *The Function of the Cooperatives, Micro, and Trade Service in the Development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Pontianak City.* ***Thesis. Government Science Study Program, Department of Administrative Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak 2025.***

This study aims to explain the function of the Cooperatives, Micro Enterprises, and Trade Office in developing micro, small, and medium enterprises in Pontianak City. The regulation governing the function of the office is Pontianak Mayor Regulation Number 53 of 2022 concerning the position, organizational structure, main duties, functions, and work procedures of the Cooperatives, Micro Enterprises, and Trade Office of Pontianak City. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The theory used is three indicators of Function Theory: Service Function, Empowerment Function, and Development Function. Based on the research results, the service function of the office is running quite well through the provision of facilities, information services, and digital-based business legality. However, there are still obstacles in the form of limited literacy of Micro, Small, and Medium Enterprises actors and the number of apparatus personnel that affect service quality. The empowerment function shows that the office has implemented various Micro, Small, and Medium Enterprise empowerment programs, such as training, capital assistance, promotional facilitation, and cross-sectoral collaboration. However, there are several obstacles such as limited information, digital literacy, and market access. The department's development function is realized through the construction of culinary centers, traditional markets, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) buildings, marketing facilitation, and digital transformation. However, obstacles remain, such as limited capital, human resources, and technological literacy among MSMEs.

Keywords: Function, Cooperatives Department, Pontianak City Micro, Small, and Medium Enterprises, MSME

RINGKASAN HASIL PENELITIAN

Skripsi yang ditulis oleh peneliti berjudul "Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pontianak". Peneliti menetapkan judul ini dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Pontianak didasarkan karena masih banyaknya pelaku usaha yang menghadapi kendala modal, manajemen produksi, serta keterbatasan akses bahan baku berkualitas. Selain itu, permasalahan dalam pemasaran digital, kurangnya promosi, serta lemahnya pencatatan keuangan menambah hambatan bagi daya saing UMKM lokal. Keterbatasan pengetahuan akuntansi dan manajemen SDM juga menjadi faktor penghambat yang membutuhkan perhatian khusus. Dalam konteks ini, peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan menjadi sangat strategis karena melaksanakan fungsi pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana fungsi pemerintah daerah berkontribusi dalam mengatasi permasalahan tersebut dan mendorong UMKM agar mampu berkembang secara berkelanjutan.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah "Bagaimana Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pontianak?". Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskriptifkan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pontianak. Teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu teori Ryaas Rasyid (dalam Dadang Sufianto, 2017:18) mengemukakan bahwa

pemerintah itu mempunyai 3 (tiga) fungsi yang hakiki yaitu fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pembangunan. Penulisan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif sehingga memberikan gambaran secara menyeluruh dan jelas terhadap masalah penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan bagi pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan UMKM di Kota Pontianak.

Hasil penelitian yang didasarkan pada penggunaan teori Ryaas Rasyid (dalam Dadang Sufianto, 2017:18) yang terdiri dari 3 fungsi pemerintah yaitu Pelayanan, Pemberdayaan dan Pembangunan. Pada fungsi pelayanan Diskumdag Kota Pontianak telah berjalan cukup baik melalui penyediaan sarana, layanan informasi, dan legalitas usaha berbasis digital, meskipun masih terkendala keterbatasan literasi pelaku UMKM serta jumlah aparatur yang memengaruhi kualitas layanan. Pelaksanaan fungsi pemberdayaan menunjukkan bahwa Diskumdag Kota Pontianak telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan UMKM melalui pelatihan, bantuan modal, fasilitasi promosi, serta kolaborasi lintas sektor, meskipun masih menghadapi kendala keterbatasan informasi, literasi digital, dan akses pasar serta fungsi pembangunan oleh Diskumdag Kota Pontianak diwujudkan melalui pembangunan sentra kuliner, pasar rakyat, Gedung UMKM, fasilitasi pemasaran, dan transformasi digital, meskipun masih terkendala keterbatasan modal, SDM, serta literasi teknologi pelaku UMKM. Saran dari penelitian ini dalam pelaksanaan fungsi pelayanan, Pemerintah Kota Pontianak melalui Diskumdag perlu memperkuat kapasitas pegawai, teknologi informasi,

serta sosialisasi prosedur digital agar pelayanan UMKM lebih efektif. Selain itu, perluasan media informasi, pendampingan langsung, dan tindak lanjut cepat atas pengaduan masyarakat akan meningkatkan kepercayaan publik serta pemerataan manfaat layanan. Pelaksanaan fungsi pemberdayaan oleh Pemerintah melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan perlu memperluas sosialisasi, pendampingan, serta pelatihan yang lebih singkat dan intensif agar UMKM memahami prosedur bantuan, meningkatkan keterampilan, serta mampu bersaing di era digital. Lebih lanjut, kolaborasi dengan pihak swasta dan akademisi, penyederhanaan akses permodalan, serta penguatan komunitas UMKM penting untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal. Pelaksanaan fungsi pembangunan oleh Pemerintah melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan perlu memperluas pembangunan sentra UMKM, mengoptimalkan Gedung UMKM sebagai pusat promosi digital, serta memperkuat infrastruktur dan akses permodalan melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan. Upaya ini diharapkan mampu mendukung transformasi digital, memperluas pemasaran hingga tingkat internasional, serta memperkuat peran UMKM sebagai sektor unggulan daerah yang berdaya saing tinggi.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Devi Lestari

Nomor Mahasiswa : E1032211024

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan guna memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 12 September 2025
Yang membuat pernyataan,

Devi Lestari
E1032211024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

"Sesungguhnya Gampang Dan Susah Itu Tidak Ada Kalau Kita Semua Berani Pada Yang Gampang,Takut Pada Yang Susah, Maka Kita Tidak Akan Maju.Namun Bagi Mereka Jiwa Yang Kokoh Dan Mantap,Sesungguhnya Gampang,Susah,Baik Dan Buruk Itu Hanya Satu, Keyakinan".
(K.H.DEWANTARA)

"Masa Depan Tidak Akan Ramah Bagi Kalian Yang Apatis
Masa Depan Tidak Mau Berkompromi Bagi Kalian Yang Pemalas
Masa Depan Tidak Mau Berdamai Pada Kalian Yang Menyalahkan Orang Lain
Masa Depan Akan Angkuh Pada Mereka Yang Selalu Menyalahkan Orang Tuanya &
Masa Depan Itu Mau Berdamai, Berkawan Kepada Mereka Yang Selalu Berpikir Positif,Optimis,Dan Perkerja Keras"
(MAMAN ABDURRAHMAN)
MENTERI UMKM RI

Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT. Karena hanya atas izin dan karunianya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Orang tua tercinta dan tersayang, Bapak **Rico Kasta** dan Ibu **Dewi Sartika** Terima kasih atas segala doa dan dukunganya,tanpa kalian penulis tidak sekuat ini.
3. Untuk seluruh keluarga, terima kasih atas doa dan dukunganya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul **"Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pontianak"** ini tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan merupakan kewajiban penulis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S1 (Strata-1). Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Keberhasilan dari penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dorongan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. Herlan, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
2. Dr. Ira Patriani, S.IP, M.Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
3. Bima Sujendra, S.IP, M.Si., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan.
4. Dr. Erdi, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan studi pada Prodi Ilmu Pemerintahan.

5. Drs. Sukamto, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi selama proses penulisan usulan penelitrian ini.
6. Dr. Yulius Yohanes, M.Si Selaku Dosen Pendamping yang telah memberikan bimbingan arahan serta motivasi selama proses penulisan usulan penelitian ini.
7. Dr. Elyta, M.Si, selaku Dosen Penguji Utama yang sudah berkenan memberikan masukan dan saran terhadap penelitian penulis.
8. Haunan Fachry Rohilie, S.I.P.,MA, selaku Dosen Penguji Pendamping sudah berkenan memberikan masukan dan saran terhadap penelitian penulis.
9. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Dosen Pengajar di Prodi Ilmu Pemerintahan.
10. Bapak/Ibu Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan dukungan selama proses perkuliahan.
11. Teman teman Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2021.
12. Terimakasih Keluarga Besar Tercita Datok Alwi dan Julia, Kakek Jumain atas dukungan dan doa Keluarga
13. Sahabat sahabat penulis, Cici Lestari, Asih Yuniarsi, Wiwik Suliana, Eriani Sakira, Leoni, Vingky Aulia Januarti, Ine Febrianti, Nanda Asnuri,Khoirunisa,Sri Rahmawati, Titis dan Tirsa terimakasih atas nasehat dan dukungannya dari masa sekolah sampai perkulihan ini.

14. Keluarga besar Ir.H. Prabasa Anantatur,M.H, dan Ibu Hj.Rubaeti Erlita Prabasa,Sos,I.,S.H terimakasih atas dukungan, motivasi, support , nasehat yang terbaik kepada penulis.
15. Terimakasih untuk kakak-kakak dan abang-abang tercinta, Siti Muslimah, Siti Nurhaliza, Fuji Astuti , Debby, Evhawati, Tan Deris, Wahyu, Haziq, Rafijan Sambasia atas motovasi, dan saran-saran nya.
16. Terimakasih kepada teman-teman pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Barat atas support, dukungan dan memberi nasehat dan arahan dalam mengerjakan skripsi.
17. Terimakasih untuk Pak Cik Sehan Abdurraham atas support Biaya siswa selama perkuliahan dan nasehat nya dalam menjalankan perkuliahan.
18. Terimakasih teman-teman KKM FISIP UNTAN tahun 2024 Kelompok 2 Desa Pedalaman atas pengalaman dan pelajarannya.
19. Sahabat-sahabat perkulihan Nita Ivana, Ester Putri Parlindungan, Khelista ,Melvia dan Dulce terima kasih atas dukungan, semangat dan motivasi selama perkulihan.
20. Terimakasih sahabat Nongki, Fiqri Reza Phalevi dan Nabila dukungan dari awal tes masuk perkulihan hingga selesai.
21. Alm.Nenek saya tercinta, Nabahah dan Kastoni terimakasih atas support nya atas dukungan nya semasa masih bersama di dunia.
22. Desty Emelya dan Desty Purwasih Adik adik saya terimakasih atas semangat yang telah di berikan

23. Ir. Apriyadi Suustra Upi Terimakasih telah menjadi rumah tempat berkeluh kesah selama penulisan skripsi.Terimakasih segala Usaha yang diberikan mulai dari dukungan,doa dan support dalam proses penyusunan skripsi ini selesai.

Pontianak, 12 September 2025

Devi Lestari
E1032211024

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN i
LEMBAR PENGESAHAN ii
ABSTRAK iii
ABSTRACT iv
RINGKASAN HASIL PENELITIAN v
PERNYATAAN KEASLIAN viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ix
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR TABEL xvii
DAFTAR GAMBAR xviii
DAFTAR LAMPIRAN xix
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2. Identifikasi Masalah 7
1.3. Fokus Penelitian 7
1.4. Rumusan Masalah 7
1.5. Tujuan Penelitian 7
1.6. Manfaat Penelitian 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
2.1.Definisi dan Konsep 9
2.1.1. Fungsi Pemerintahan 9
2.1.2. Pemberdayaan Pemerintah 10
2.1.3. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 12
2.2.Teori Fungsi Pemerintah 12
2.3. Hasil Penelitian Yang Relevan 15
2.4. Alur Pikir Penelitian 19
BAB III METODE PENELITIAN 22

3.1. Jenis Penelitian 22
3.2 Langkah-Langkah Penelitian 22
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 23
3.3.1. Lokasi Penelitian 23
3.3.2. Waktu Penelitian 24
3.4. Subjek dan Objek Penelitian 25
3.4.1 Subjek Penelitian 25
3.4.2. Objek Penelitian 26
3.5. Teknik Pengambilan Data 26
3.6. Instrumen atau Alat Pengumpulan Data 28
3.7. Analisis Data 29
3.7.1 Teknik Analisis Data 29
3.7.2 Teknik Keabsahan Data 32
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 34
4.1 Gambaran Umum Wilayah Kota Pontianak 34
4.1.1 Keadaan Geografis, Luas dan Batas Wilayah Administratif 34
4.1.2 Kondisi Demografi 38
4.2. Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak 40
4.2.1 Kedudukan Diskumdag Kota Pontianak 40
4.2.2 Struktur Organisasi 40
4.2.3 Visi dan Misi Diskumdag Kota Pontianak 43
4.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak 43
4.3. Gambaran Umum Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pontianak 56
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 59
5.1. Hasil Penelitian 59
5.2. Pembahasan 60

5.2.1. Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Dalam Pengembangan UMKM di Kota Pontianak 60
5.2.2. Fungsi Pemberdayaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Dalam Pengembangan UMKM di Kota Pontianak 74
5.2.3. Fungsi Pembangunan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Dalam Pengembangan UMKM di Kota Pontianak 86
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 96
6.1 Kesimpulan 96
6.2. Saran 98
6.3. Keterbatasan Penelitian 100
DAFTAR PUSTAKA 10101
DAFTAR LAMPIRAN 103

DAFTAR TABEL

Tabel *Halaman*

2.1 Hasil Penelitian Yang Relevan 16
3.1 Waktu Penelitian 24
4.1 Persentase Kecamatan Terhadap Luas Kota Pontianak 36
4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Pontianak (2023) 38
4.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 39
5.1 Jumlah Pegawai Diskumdag Kota Pontianak 70
5.2 Data Penerima Bantuan Modal 77
5.3 Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Baru 91

DAFTAR GAMBAR

Gambar *Halaman*

2.1 Kerangka Pikir Penelitian. 20
4.1 Peta Administrasi Kota Pontianak 35
4.2 Struktur Organisasi DKUMP Kota Pontianak 42
5.1 Dokumentasi Wawancara terkait Pelayanan 63
5.1 Publikasi Dokumentasi Kegiatan Diskumdag 67
5.2 Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Halal Kepada 80
5.3 Dokumentasi Program Pendampingan Perizininan Usaha 82
5.4 Dokumentasi dari Media Lokal Terkait Pusat UMKM 88
5.5 Gedung UMKM Center Kota Pontianak 93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran *Halaman*

1. Panduan Wawancara 103
2. Daftar Nama Subjek Penelitian 107
3. Dokumentasi Penelitian 108
4. Surat Tugas Penelitian..... ...109
5. Daftar Riwayat Hidup 110

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada negara berkembang salah satu yang menjadi prioritas utama dalam melaksanakan kegiatan negaranya adalah pembangunan nasional, begitu halnya dengan bangsa Indonesia. Salah satu hal yang diperhatikan dalam pembangunan nasional di Indonesia adalah di bidang ekonomi. Pada era otonomi daerah saat ini, mewujudkan pembangunan nasional pada bidang ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam membangun potensi daerahnya. Diperlukan berbagai upaya yang lebih inovatif dan kreatif oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya.

Salah satu yang menjadi potensi di tiap daerah adalah keberadaan Usaha Kecil Menengah (UKM). UKM memiliki peran yang starategis dalam penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan daerah maupun masyarakat lokal. Salah satunya adalah Kota yang menempatkan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada posisi yang strategis untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. (Hesti Kusuma Wardani Ambar Pertiwi, 2020).

Pembangunan ekonomi nasional Indonesia sangat bergantung pada peran strategi Usaha Mikro,kecil dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian rakyat.Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 yang

mengatur tentang UMKM mendefinisikan usaha mikro sebagai berikut: Usaha mikro adalah usaha menguntungkan yang dikuasai oleh perorangan atau sekelompok orang yang memenuhi persyaratan usaha mikro yang dituangkan dalam Undang-undang ini. Maksimum 50 juta Rupiah untuk aset; Maksimal 300 juta Rupiah untuk omzet.Usaha kecil adalah perusahaan yang produktif secara ekonomi yang beroperasi secara independen dan dijalankan oleh orang atau organisasi yang tidak berfungsi sebagai cabang atau anak perusahaan dari perusahaan besar atau perusahaan menengah yang mereka miliki, kendalikan, atau yang mereka ikuti secara tidak langsung atau langsung. Usaha kecil juga harus memenuhi persyaratan untuk usaha kecil sebagaimana ditentukan oleh undang-undang ini. Parameter aset dan omset masing-masing adalah 50 juta hingga 500 juta dan 300 juta hingga 2,5 miliar rupiah. Usaha menengah adalah usaha yang menguntungkan, beroperasi secara independen, dan dijalankan oleh individu atau organisasi yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan besar yang dimiliki, dikelola, atau berafiliasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan usaha kecil atau besar. Usaha ini memiliki total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan definisi dalam undang-undang ini (UU No. 20 Tahun 2008). Persyaratan aset: 500 juta hingga 10 miliar rupiah, dan persyaratan omzet: lebih dari 2,5 miliar hingga 50 miliar rupiah.

Data dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan menengah (2024) menyatakan bahwa presentasi UMKM di Indonesia mencapai 66 juta dan memberikan kontribusi sebesar 61% terhadap pendapatan domestic bruto (PDB), walaupun UMKM bukan merupakan usaha besar,namun peran UMKM dalam

menggerakan sektor perekonomian negara tidak dapat diragukan bahwa UMKM telah berperan besar dalam menggerakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dimana 60% nya merupakan kontribusi UMKM.

UMKM masih dapat tetap eksis di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, kesenjangan ekonomi, hingga ketidak pastina geopolitik. UMKM mampu menciptakan lapangan kerja, terutama di daerah-daerah local, dan memebantu mengungari ketimpangan ekonomi. Meihat peranan UMKM terrhadap pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan, maka sudah sepqatutu nya UMKM mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, terutama pemerintah yang bertanggung jawab terhadap perkembangan UMKM itu serndiri. Dengan adanya keterlibatan dari pemerintah, maka diharapkan UMKM juga bisa mendapatkan akses sumber daya untuk mengembangkan usahanya.

Pengembangan UMKM diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.dimana dalam pasal 1 (10) dijabarkan bahwa Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah tentang pengembangan UMKM adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan Pemerintah ini memberikan kebijakan yang menyederhanakan perizinan usaha,

memepermudah akses pembiayaan,dan melindungi UMKM dari praktik bisnis yang merugikan.Selain itu, Peraturan Pemerintah menekankan pentingnya pemerdayaan UMKM, melalui pelatihan,akses terhadap teknologi,serta penguatann kelembagaan,termasuk koperasi,yang seringkali menjadi bagian dari ekosistem UMKM.

Kota Pontianak merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Barat, memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagai kota yang memiliki jalur perdagangan internasional, Pontianak berperan sebagai pintu masuk ekonomi di Kalimantan Barat. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 4. 056 UMKM di Kota Pontianak. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak mengalami adanya kenaikan jumlah pelaku UMKM dari tahun ke tahun. Angka ini menunjukkan besarnya potensi sektor ini dalam menyerap tenaga kerja, menurunkan tingkat kemiskinan, serta mendorong kemandirian ekonomi di daerah tersebut.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak memiliki tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Pontianak Nomor 53 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 121 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berikut fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak:

a. Perumusan kebijakan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
e. Pelaksanaan administrasi dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Pontianak; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Pontianak yang berikaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan.

Namun, banyak pelaku UMKM di Kota Pontianak menghadapi beberapa masalah yang membuat usaha mereka sulit berkembang. Menurut, M.Fahmi selaku pendamping UMKM Kota Pontianak mengatakan bahwa Rata-rata permasalah UMKM kota pontianak ini seperti Masalah manajemen produksi pada UMKM di Kota Pontianak seringkali berkisar pada beberapa faktor utama, termasuk keterbatasan modal, kurangnya pengetahuan tentang manajemen produksi, kesulitan dalam mendapatkan bahan baku berkualitas.

Masalah Pemasaran manajemen pemasaran yang dihadapi oleh UMKM di Kota Pontianak cukup beragam dan berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan daya saing usaha mereka faktor utama Kurangnya Keterbatasan pemahaman dan pemanfaatan pemasaran digital,Kurangnya sosialisasi dan promosi produk UMKM di Pontianak belum melakukan pencatatan keuangan secara terstruktur dan Kurangnya pengetahuan dan pemahaman akuntansi dasar. Masalah Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dalam UMKM Kota Pontianak merupakan salah satu kendala utama yang menghambat perkembangan dan daya saing UMKM.

Dalam hal ini, fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sebagai pembinaan atau pelatihan dan fasilitator dalam pengembangan UMKM agar dapat bertahan dan berkembang secara berkelanjutan. Namun dalam kenyataanya sebagian besar UMKM masih ada yang belum memiliki perizinan lengkap seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai tanda legalitas usaha mereka yang disebabkan karena beberapa faktor seperti ketidaktahuan, akses terbatas ke internet dan proses yang dianggap rumit.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak melaksanakan berbagai fungsi strategis seperti pelatihan, pembinaan, dan fasilitator. Fungsi straegis tersebut diarahkan untuk mengatasi hambatan- hambatan utama yang dihadapi pelaku usaha mikro dan kecil. Dengan demikian, efektivitas dan pencapaian dari berbagai fungsi dan kebijakan yang dijalankan perlu ditelusuri dan dievaluasi secara akademis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana **Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Dalam Pengembangan UMKM di Kota Pontianak**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengidentifikasikan masalah penelitian ini terdiri atas :

1. Kurangnya pelatihan pendampingan dan pembiayaan pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Rendahnya kemampuan manajemen produksi, keuangan, pemasaran dan Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Masih banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang belum memiliki perizinan lengkap seperti Nomor Induk Berusaha (NIB)

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada "Fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dalam Pengembangan UMKM khususnya dalam Pelatihan, Pembinaan dan Fasilitator UMKM di Kota Pontianak"

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan maka rumusan masalah untuk penelitian ini "Bagaimana Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pontianak?"

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pontianak.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada penelitian ini setidaknya terdapat 2 manfaat yang diharapkan yaitu :

1. Manfaat Teoritis, Hasil dari penelitian ini nantinya dapat memberikan informasi serta ilmu pengetahuan bagi kemajuan Ilmu Pemerintahan secara umum, dan secara khusus mengenai Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Pedagangan dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pontianak dan sebagai bahan evaluasi bagi peran pemerintah dan badan instansi terkait lainnya dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pontianak.
2. Manfaat Praktis, Bagi peneliti kajian ini dapat membantu penulis untuk lebih memahami bagaimana Fungsi Dinas Koperasi,Usaha Mikro dan Perdagangan terhadap pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Pontianak. Selain itu, bagi masyarakat dapat memberikan bahan bacaan, pengetahuan, dan informasi kepada masyarakat tentang fungsi dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Pontianak. Serta bagi program studi penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber oleh penulis lain untuk penelitian studi UMKM tambahan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang keterlibatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Pontianak.